

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Lacak Mobil Mewah Penunggak Pajak dengan CCTV

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melacak mobil mewah penunggak pajak lewat kamera pengintai atau *closed-circuit television* (CCTV). Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafrudin, mengatakan instansinya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Teknologi, dan Informasi Provinsi DKI Jakarta agar bisa menggunakan seluruh jaringan CCTV di Ibu Kota.

Faisal beralasan pelacakan lewat CCTV dilakukan karena kesadaran membayar pajak pemilik kendaraan mewah masih rendah. Tapi dia belum menjelaskan detail rencana pelacakan kendaraan lewat teknologi CCTV tersebut. "Kami koordinasi dulu," kata dia kepada *Tempo*, Jumat lalu.

Badan Pajak mencatat 2.751 unit kendaraan mewah menunggak pajak. Dengan tunggakan rata-rata di atas Rp 20 juta, total utang pajak pemilik mobil mewah sekitar Rp 91,8 miliar. Selain melacak kendaraan mewah, menurut Faisal, Badan Pajak akan mengusut sekitar 13.515 unit kendaraan biasa yang menunggak pajak Rp 10-20 juta. Total tunggakan pajak kendaraan kategori non-mewah itu sekitar Rp 178,5 miliar.

Pada tahun ini, Badan Pajak menargetkan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dibanding tahun lalu. Hingga 14 Februari lalu, total pajak kendaraan yang masuk sebesar Rp 1,02 triliun, dari target penerimaan tahun ini yang sebesar Rp 8,8 triliun. "Kalau realisasi BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) sebesar Rp 593 miliar dari target Rp 5,4 triliun pada 2019," kata Faisal.

Badan Pajak, menurut Faisal, akan menggenjot penagihan tunggakan pajak melalui beberapa tahap. Pertama, mereka akan mengirim surat tagihan ke alamat yang terdaftar di basis data kendaraan. Kedua, apabila tidak ada jawaban, petugas BPRD akan mendatangi alamat pemilik kendaraan tersebut untuk menagih langsung.

Masalahnya, Faisal menuturkan, pemilik kendaraan penunggak pajak tak jarang menggunakan identitas palsu untuk menghindari petugas. Mereka, misalnya, membeli ken-

Pembebasan denda dan penagihan dari pintu ke pintu belum efektif mengurangi tunggakan pajak mobil mewah sekitar Rp 91,8 miliar.

daraan mewah atas nama orang lain. Petugas penagih pajak menemukan pola seperti itu ketika mengejar penunggak pajak dari "pintu ke pintu" rumah mereka. Dalam beberapa kasus, "pemilik" yang terdaftar hanya dipinjam kartu tanda penduduk oleh pemilik asli mobil mewah tersebut. "Kami juga kesulitan mendata kendaraan karena banyak yang sudah berpindah tangan," kata Faisal.

Demi memaksimalkan penagihan pajak kendaraan terutang, pemerintah DKI sempat menggelar program penghapusan denda pajak sejak 15 November hingga 31 Desember 2018. Namun, menurut Faisal, pembebasan sanksi administrasi dalam waktu terbatas itu belum menyadarkan pemilik kendaraan mewah yang menunggak pajak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung rencana BPRD menagih tunggakan pajak kendaraan ke rumah-rumah para wajib pajak. "Ya, bagus itu, ditagih saja," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat lalu.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan pelbagai program untuk menggenjot pajak kendaraan di Ibu Kota belum efektif karena data kendaraan di kepolisian dan BPRD belum terintegrasi. Di luar kendaraan mewah yang menunggak pajak, menurut dia, di Ibu Kota juga diduga berkeliaran kendaraan mewah yang belum terdaftar sebagai obyek pajak. "Harus diungkap siapa yang menunggak dan siapa yang justru belum terdaftar," ujar dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Lacak Mobil Mewah Penunggak Pajak dengan CCTV

Mewah tapi Menunggak Pajak

Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pelbagai cara untuk menagih tunggakan pajak mobil mewah yang terus terakumulasi dari tahun ke tahun. Pemerintah DKI pun rutin mengumumkan jumlah kendaraan penunggak pajak serta nilai pajak yang terutang. Pemerintah Jakarta juga telah memberi fasilitas bebas denda pajak serta menagih dari pintu ke pintu. Yang belum dicoba pemerintah DKI adalah mengumumkan nama pemilik kendaraan mewah yang menunggak itu.

Jauh dari Target

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) 2019: **Rp 8,8 triliun**

Realisasi hingga Februari: **Rp 995 miliar**

Target bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 2019: **Rp 5,4 triliun**

Realisasi hingga Februari: **Rp 569 miliar**

Penunggak 2019

(Data per 16 Februari 2019)

Jenis	Jumlah Unit	Tunggakan
Sedan	1.380	Rp 52,3 miliar
Jip	996	Rp 28,2 miliar
Minibus	302	Rp 7,5 miliar
Pikap	8	Rp 668 juta
Bestelwagen	11	Rp 327,4 juta
Sepeda motor	131	Rp 1,62 miliar
Total:	2.798 unit	Rp 90,62 triliun

Tunggakan lain:

Kendaraan bermotor biasa - **11.708 unit - Rp 155 miliar**

Penunggak 2018

Atas nama pribadi - **744 unit - Rp 26,1 miliar**

Atas nama badan - **549 unit - Rp 18,8 miliar**

Total: 1.293 unit - Rp 44,9 miliar

SUMBER: BPRD DKI JAKARTA